

## **PENGARUH SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA SKPD KABUPATEN ACEH UTARA**

**Indana Zulfah, Sri Wahyuni dan Arina Nurfaza**

Program Studi Akuntansi  
STIE Lhokseumawe

### ***ABSTRACT***

*This study on the effect of accounting information system to the quality of the financial statements in North Aceh regency SKPD. The purpose of this study is to examine the effect of accounting information system to the quality of the financial statements in North Aceh regency SKPD. The data used in this study are primary data by dividing the questionnaire to 98 employees whose serve as research samples. The data processing is done with the help of a simple linear equation model of SPSS. The results showed that: The accounting information system has a strong relationship with the quality of financial reporting in North Aceh regency SKPD . Accounting information system has the ability to explain the effect on the quality of financial reporting in North Aceh regency SKPD.*

**Key Words:** *Accounting Information System, Quality of the Financial Statements*

### **A. Latar Belakang Masalah**

Di Indonesia, berbagai peraturan dan pedoman telah diterbitkan terkait dengan penerapan penganggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*) pada pemerintah daerah. Kemampuan untuk mengelola informasi secara efektif di dalam pemerintahan sangat penting karena dapat menjadi dasar untuk memperoleh *Good Governance*. Berdasarkan pengembangan maka di buatlah satu program sistem informasi akuntansi untuk mempermudah dan menseragamkan laporan keuangan di daerah ke pusat. Pemerintah terus mewujudkan berbagai upaya perbaikan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good*

*government governance*) antara lain perbaikan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Inpres Nomor 4 Tahun 2011, BPKP, dalam hal ini Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah, memandang perlu untuk memfasilitasi Pemerintah Daerah dalam mempersiapkan aparatnya menghadapi perubahan, mendorong pelaksanaan tata kelola keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku, *efisien, efektif, transparans, akuntabel, dan auditabel*. Dengan demikian maka pemerintah Daerah yang merupakan entitas pelaporan dapat menyajikan Laporan Keuangan secara wajar, transparan dan akuntabel.

Informasi memegang peran yang sangat penting untuk mengetahui kegiatan apa yang telah terjadi, melakukan evaluasi apakah kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan menjamin agar data tersebut dapat diolah secara efisien menjadi informasi yang akurat, dapat dipercaya, dan tepat waktu maka dalam pengolahan data tersebut diperlukan suatu alat yang dinamakan sistem informasi. Informasi adalah data yang diproses dan pemakai melakukan suatu tindakan yang dapat ia lakukan atau tidak dilakukan (Hall, 2001:14).

Sistem informasi akuntansi dirancang sedemikian rupa oleh suatu organisasi atau lembaga sehingga dapat memenuhi fungsinya yaitu menghasilkan informasi akuntansi yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami, dengan sistem informasi akuntansi yang layak dapat dihasilkan suatu laporan yang mampu memberikan berbagai informasi yang berguna bagi pihak-pihak pengambil keputusan. Kemampuan untuk mengelola informasi secara efektif di dalam pemerintahan sangat penting karena dapat menjadi dasar untuk memperoleh *Good Governance*. Sistem informasi akuntansi adalah kumpulan sumber daya seperti manusia dan peralatan yang diatur untuk mengubah data menjadi informasi (Bodnard dan Hopwood 2000:4).

Dalam pengelolaan keuangan, pemerintah melakukan reformasi tentang keuangan negara yang mensyaratkan bentuk dan isi pelaporan keuangan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan dengan standar

akuntansi pemerintahan yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah.

Pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Tujuan penting reformasi akuntansi dan administrasi sektor publik adalah akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan daerah, yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Pertanggungjawaban itu tidak hanya wajib disampaikan kepada lembaga legislatif, tetapi juga kepada masyarakat sebagai pemberi mandat atau kekuasaan kepada pemerintah.

Laporan keuangan dalam sektor publik memegang peranan penting dalam rangka menciptakan akuntabilitas sektor publik. Semakin besarnya tuntutan terhadap pelaksanaan akuntabilitas sektor publik memperbesar kebutuhan akan transparansi informasi keuangan sektor publik. Informasi keuangan ini berfungsi sebagai dasar pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. Akuntansi sektor publik memiliki peranan penting dalam menyiapkan laporan keuangan sebagai

perwujudan akuntabilitas publik (Mahmudi, 2007:3).

Laporan keuangan dibuat untuk menyajikan informasi yang relevan, andal dan dapat dipercaya berkenaan dengan posisi keuangan dan seluruh data transaksi yang di catat oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Begitu juga dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang setiap tahunnya mendapat penilaian dari auditor pemerintah dalam hal ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan keuangan pemerintah kemudian disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pelaporan keuangan harus mempertimbangkan kebutuhan para pengguna dan keputusan yang mereka buat. Oleh karena itu laporan keuangan PEMDA harus memenuhi kebutuhan pengguna yang menginginkan transparansi dan akuntabilitas atas pengelolaan keuangan publik untuk berbagai kepentingan pengguna salah satunya penggunaan informasi laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Pada umumnya tujuan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi informasi pada instansi pemerintah lebih menekankan pada tingkat pengurangan kesalahan dalam memproses transaksi yang selama ini dilakukan secara manual dan memberikan informasi laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu yang dapat digunakan oleh manajemen untuk membuat keputusan, sehingga memberikan dampak yang luar biasa mengingat instansi pemerintah merupakan sektor publik yang paling tinggi tingkat ketergantungannya pada

aktivitas-aktivitas pengumpulan, pemrosesan (Rama dan Jones, 2006:5).

Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal dan dapat dipercaya, pemerintah daerah harus memiliki sistem akuntansi yang handal. Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan. Saat ini sistem akuntansi pemerintah daerah rata-rata masih lemah (Mardiasmo, 2006). Upaya penerapan sistem informasi pada organisasi sektor publik masih mengalami beberapa kendala karena belum semua instansi menyelenggarakannya, hal ini menunjukkan bahwa sistem informasi pada organisasi sektor publik belum dijalankan dengan efektif. Penggunaan sistem informasi yang kurang efektif tersebut akan berdampak negatif pada kinerja dan mutu pelayanan organisasi sektor publik pada masyarakat.

Secara umum di Kabupaten Aceh Utara masih mempunyai kelemahan terutama yang terkait dengan pengelolaan keuangan. Dalam indikatornya menunjukkan efektivitas masih di bawah ideal, artinya masih ada target kinerja dalam pembangunan kabupaten Aceh Utara yang belum tercapai sesuai dengan sasaran target. Selain itu terdapat kelemahan pada bagian bendaharawan di setiap SKPD yang belum melakukan pengendalian secara maksimal. Kemudian Bagian keuangan setiap SKPD belum melaksanakan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Pembukuan dan pencatatan pada tingkat SKPD belum dilaksanakan

dengan baik. Jika ditinjau dari pengendalian internal, bahwa masih ditemukan kelemahan dan kekurangan pada pelaksanaan APBD Kabupaten Aceh Utara yaitu sistem dan prosedur akuntansi yang belum diterapkan secara maksimal pada bagian Keuangan pada masing-masing SKPD. Hal tersebut terbukti ditemukannya tidak konsisten pelaksanaan pengelolaan anggaran dengan aturan yang telah ditetapkan dimana belum optimalnya fungsi beberapa SKPD (Modus Aceh, 28 Mei 2015).

Permasalahan di atas salah satu penyebabnya adalah pengendalian internal. Sistem akuntansi, pengendalian internal yang berlaku dalam organisasi/instansi merupakan faktor yang menentukan keandalan laporan keuangan yang dihasilkan oleh organisasi tersebut. Pemerintah dalam memberikan pendapat atas kewajaran laporan yang diauditnya auditor meletakkan kepercayaan dalam mencegah terjadinya kesalahan yang material dalam proses akuntansi atas kualitas laporan keuangan.

Berkaitan dengan yang ditegaskan oleh ketua Badan Pemeriksa Keuangan bahwa diperlukan percepatan perbaikan dari sistem informasi akuntansi di pemerintahan daerah melalui langkah-langkah nyata, terprogram dan mengikut sertakan berbagai kalangan tidak hanya dari pemerintah daerah saja, yang hasilnya akan mendukung aparat pemerintah daerah untuk membuat laporan keuangan yang berkualitas.

Penelitian ini merujuk kepada penelitian Juwita (2013) yang mana hasil penelitian tersebut mengatakan secara simultan maupun parsial, memperlihatkan bahwa implementasi

standar akuntansi pemerintahan dan implementasi sistem informasi akuntansi berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang disebutkan di atas yaitu terdiri dari dua variabel bebas yaitu implementasi standar akuntansi pemerintahan dan implementasi sistem informasi akuntansi sedangkan penelitian ini dibatasi pada satu variabel bebas yaitu pada sistem informasi akuntansi. Sementara perbedaan lain yaitu lokasi dan waktu penelitian. Sedangkan variabel terikat sama-sama mengenai kualitas laporan keuangan.

## **B. Landasan Teori**

### **1. Sistem Informasi Akuntansi**

Sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan (Jogiyanto, 2005:11). Sedangkan menurut Hall (2001:7) bahwa sistem informasi adalah sebuah rangkaian prosedur formal dimana data dikumpulkan, diproses menjadi informasi dan didistribusikan kepada para pemakai.

Bodnar dan Hopwood (2000:1) menyatakan bahwa Sistem Informasi Akuntansi (SIA) adalah kumpulan sumber daya seperti manusia dan peralatan, yang diatur untuk mengubah data menjadi informasi, informasi itu dikomunikasikan kepada beragam pengambilan keputusan. Menurut Susanto (2004:2) sistem informasi adalah kumpulan dari sub-sub sistem baik fisik maupun non fisik yang

saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan yaitu mengolah data menjadi informasi yang berguna.

Sistem akuntansi menurut Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2009 adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum (Halim, 2007:52). Menurut Marshall dan John (2004:2) menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi adalah rangkaian dua atau lebih komponen-komponen yang saling berhubungan, yang berinteraksi untuk mencapai tujuan.

Dari kutipan di atas jelas diketahui bahwa di dalam sistem akuntansi yang perlu mendapat perhatian utama adalah mengumpulkan data agar sesuai dengan informasi yang diperlukan sebagai alat untuk menggunakan buku-buku yang dituliskan dengan tangan, mesin ataupun dengan alat elektronik lainnya. Sistem informasi akuntansi memproses data yang diterima untuk menghasilkan dokumen, laporan dan informasi lainnya dalam satuan mata uang ini memberikan informasi digunakan untuk mengetahui besarnya penyimpangan satu pos biaya dari anggaran yang telah ditetapkan dan akhirnya informasi itu digunakan untuk mengambil keputusan.

## **2. Tujuan dan Kegunaan Sistem Informasi Akuntansi**

Tujuan sistem informasi akuntansi menurut Hall (2008: 44) adalah sebagai berikut:

1) Mendukung operasional harian

Sistem informasi menyediakan informasi bagi personel operasi untuk membantu mereka melakukan tugas mereka setiap hari dengan efisien dan efektif.

2) Mendukung fungsi kepengurusan manajemen

Kepengurusan merujuk ke tanggung jawab manajemen untuk mengatur sumber daya perusahaan secara benar. Sistem informasi menyediakan informasi tentang kegunaan sumber daya ke pemakai eksternal melalui laporan keuangan tradisional dan laporan-laporan yang diminta lainnya. Secara eksternal, pihak manajemen menerima informasi kepengurusan dari berbagai laporan pertanggungjawaban.

3) Mendukung proses pengambilan keputusan manajemen

Sistem informasi memberikan informasi yang diperlukan para manajer untuk melakukan tanggung jawab pengambilan keputusan.

Sedangkan kegunaan sistem informasi akuntansi seperti yang dipaparkan Rama dan Jones (2006:6) adalah sebagai berikut:

1) Mendukung perencanaan dan pengendalian

Di mana informasi yang berkenaan dengan anggaran dan biaya standar disimpan dalam sistem informasi, kemudian laporan dirancang untuk menbandingkan antara anggaran dengan aktual. Disinilah peran sistem informasi untuk aktivitas perencanaan dan pengendalian.

2) Menerapkan pengendalian internal  
Pengendalian internal termasuk kebijakan perusahaan, prosedur,

dan sistem informasi yang digunakan untuk melindungi aset-aset organisasi dari kerugian atau kehilangan, dan untuk memelihara keakuratan data financial.

- 3) Mendukung aktivitas rutin  
Para pimpinan membutuhkan sistem informasi akuntansi untuk menangani aktivitas operasi rutin selama siklus operasi organisasi berjalan.
- 4) Mendukung pengambilan keputusan  
Informasi juga dibutuhkan untuk mendukung pengambil keputusan non-rutin pada semua tingkatan organisasi.

### 3. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan (PP Nomor 24 Tahun 2005). Menurut penjelasan UU Nomor 17 Tahun 2003 salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti SAP yang telah diterima secara umum.

Menurut Sundjaja (2002: 68) laporan keuangan adalah suatu laporan yang menggambarkan hasil dari proses akuntansi yang digunakan sebagai alat komunikasi antar data keuangan atau aktivitas perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas tersebut. Sementara menurut Munawir (2002: 2) laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang dapat memberikan informasi

tentang suatu keadaan perusahaan sekaligus merupakan alat komunikasi antara data keuangan dengan pihak yang berkepentingan dengan data organisasi tersebut. Laporan keuangan sebagai hasil proses dari akuntansi merupakan penghubung antara perusahaan dengan pihak yang berkepentingan yaitu dengan memberikan informasi yang bermanfaat bagi pihak tersebut untuk mengetahui keadaan dan perkembangan perusahaan bersangkutan.

Menurut Harahap (2002:7) mengatakan bahwa laporan keuangan merupakan produk atau hasil akhir dari suatu proses akuntansi. Sementara menurut APB (2002: 117) Laporan keuangan adalah suatu alat dengan mana informasi dikumpulkan dan diproses dalam akuntansi keuangan yang akhirnya dimasukkan dalam laporan yang dikomunikasikan secara periodik kepada para pemakainya.

Menurut Irham (2012:2) Laporan keuangan adalah produk akhir dari akuntansi yang nantinya akan dianalisa lebih lanjut oleh pihak yang berkepentingan sebelum mengambil keputusan. Sementara menurut Noudirwan (2007:151) laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan periode sebelumnya atau dengan laporan keuangan entitas yang lain.

Pasal 53 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 disebutkan sebagai berikut:

- 1) Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya kepada Kuasa Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah.
- 2) Kuasa Bendahara Umum Negara bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dari segi hak dan ketaatan kepada peraturan atas pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukannya.
- 3) Bendahara Umum Negara bertanggung jawab kepada Presiden dari segi hak dan ketaatan kepada peraturan atas pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukannya.
- 4) Bendahara Umum Daerah bertanggung jawab kepada gubernur/bupati/walikota dari segi hak dan ketaatan kepada peraturan atas pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukannya.

Selanjutnya pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 disebutkan sebagai berikut:

- 1) Pengguna anggaran bertanggung jawab secara formal dan material kepada Presiden/gubernur/bupati/walikota atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya.
- 2) Kuasa pengguna anggaran bertanggung jawab secara formal dan material kepada pengguna anggaran atas pelaksanaan kegiatan yang berada dalam penguasaannya.

Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi terstruktur posisi keuangan akibat transaksi yang

dilakukan. Laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas public menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi berupa laporan keuangan (Mardiasmo, 2002: 25).

Menurut BAPEPAM (2002: 11) laporan keuangan yang lengkap meliputi: neraca, laporan rugi laba, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan dilakukan secara periodik dan periode yang biasanya digunakan adalah tahunan yang mulai 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah unit pemerintahan pengguna anggaran yang diwajibkan menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabung pada entitas pelaporan. SKPD selaku pengguna anggaran harus menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, asset, utang dan ekuitas dana, termasuk transaksi pendapatan dan belanja, yang berada dalam tanggung jawabnya. Hal ini berarti bahwa setiap SKPD harus membuat laporan keuangan unit kerja. Laporan keuangan yang harus dibuat setiap unit kerja adalah Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan tersebut disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai dasar

penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Akuntansi merupakan suatu sistem informasi yang memberikan keterangan mengenai data ekonomi untuk pengambilan keputusan bagi siapa saja yang membutuhkannya. Dalam akuntansi, informasi yang dimaksudkan itu disusun dalam ikhtisar dalam laporan keuangan. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2007: 12) menyatakan laporan keuangan yang lengkap terdiri dari lima, yakni: laporan laba rugi, laporan ekuitas pemilik, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Laporan keuangan dapat dengan jelas memperlihatkan gambaran kondisi keuangan dari pengelola keuangan. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2007:7) bahwa laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang disajikan dalam berbagai cara misalnya laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

### C. Metode Penelitian

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menggunakan instrument angket. Angket adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada responden untuk memberikan respons sesuai dengan permintaan penulis. Adapun angket yang dibagikan kepada responden berisi butir pertanyaan mengenai variabel sistem informasi akuntansi (X) dan kualitas laporan keuangan (Y) pada SKPD Kabupaten Aceh Utara.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis data kuantitatif. Metode analisis data kuantitatif adalah metode analisis data yang menggunakan perhitungan angka-angka yang nantinya akan dipergunakan untuk mengambil suatu keputusan di dalam memecahkan masalah. Sedangkan alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan regresi linier sederhana. Bentuk formula regresi linier sederhana adalah sebagai berikut :

$$Y = a + bX + e$$

Dimana: Y : Kualitas laporan keuangan

a : Konstanta

X : Sistem informasi akuntansi

b : Koefisien Regresi

e : *Error Term*

Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji parsial (uji t) gunanya yaitu untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel bebas secara signifikan terhadap variabel terikat secara parsial atau individu. Tujuan pengujian signifikansi parameter individual adalah untuk mengetahui variabel bebas dapat menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel terikat secara nyata. Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji-t yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dengan tingkat keyakinan 95% ( $\alpha = 0,05$ ). Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- Merumuskan hipotesis
- Menghitung koefisien korelasi dengan korelasi *product moment*.
- Mencari harga  $F_{hitung}$ .

- d. Harga  $F_{hitung}$  tersebut selanjutnya dibandingkan dengan harga  $F_{tabel}$ .
- e. Menarik kesimpulan dari hipotesis.

Adapun kriteria pengujian hipotesis untuk uji parsial (uji-t) adalah :

$H_0$ : Apabila  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima artinya sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD Kabupaten Aceh Utara.

$H_1$ : Apabila  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka  $H_1$  diterima sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD Kabupaten Aceh Utara.

#### D. Pembahasan

Berdasarkan hasil yang diperoleh di atas, sistem informasi akuntansi mempunyai hubungan yang kuat dengan kualitas laporan keuangan pada SKPD Kabupaten Aceh Utara. Sistem informasi akuntansi manusia memiliki kemampuan dalam menjelaskan pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD Kabupaten Aceh Utara dan sistem informasi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD Kabupaten Aceh Utara. Hubungannya sistem informasi akuntansi dengan kualitas laporan keuangan pada SKPD Kabupaten Aceh Utara karena laporan keuangan yang dibuat sudah standar dengan peraturan pemerintah yang telah ditetapkan.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Standar akuntansi pemerintahan merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Tujuan penting

reformasi akuntansi dan administrasi sektor publik adalah akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, kualitas pelaporan keuangan merupakan informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Keandalan adalah kemampuan informasi untuk memberi keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid.

Berdasarkan fakta di lapangan dalam pengelolaan keuangan pemerintah yang baik, SKPD Kabupaten Aceh Utara telah memiliki sistem informasi akuntansi yang baik. Hal ini terlihat dari laporan keuangan yang sudah memenuhi standar akuntansi. Sehubungan dengan hasil *cross check* dan observasi saat penyebaran kuesioner kepada responden diperoleh hasil bahwa dari 63 SKPD di Kabupaten Aceh Utara yang diteliti, Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara merupakan salah satu SKPD terbaik dalam membuat laporan keuangan dan laporan keuangan tersebut telah memenuhi standar akuntansi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil yang diperoleh di atas, relevan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Bastian (2006:123) bahwa laporan keuangan mempunyai karakteristik yang andal yang mana laporan keuangan tersebut bebas dari

pengertian yang menyesatkan dan kesalahan, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diferivikasi. Disamping itu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna untuk mengetahui isi yang dimaksud dalam laporan keuangan. Pelaporan keuangan daerah merupakan faktor penting untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal dan dapat dipercaya, pemerintah daerah harus memiliki sistem akuntansi yang handal. Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan. Penelitian ini merujuk kepada penelitian Juwita (2013) yang mana hasil penelitian tersebut mengatakan bahwa implementasi sistem informasi akuntansi berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Oleh karena itu penerapan sistem informasi akuntansi merupakan pelaksanaan dalam menerapkan seluruh komponen dalam sistem akuntansi keuangan daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas.

## E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :

- 1) Sistem informasi akuntansi mempunyai hubungan yang kuat dengan kualitas laporan keuangan pada SKPD Kabupaten Aceh Utara.
- 2) Sistem informasi akuntansi memiliki kemampuan dalam menjelaskan pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD Kabupaten Aceh Utara.
- 3) Sistem informasi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD Kabupaten Aceh Utara.

## F. Daftar Pustaka

- APB. (2002). Statement No. 4, *Basic Concepts and Accounting Principles Underlying Financial Statements of Bussiness Enterprice*
- Baridwan, Zaki. (2001). *Intermedite Accounting*. Yogyakarta: BPFE.
- Bastian, Indra. (2006). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Bodnar, George H., William S. Hopwood. (2000). *Sistem Informasi Akuntansi*, Edisi VI, Terjemahan Amir AJ, Rudi M.T. Jakarta: Salemba Empat.
- Frasiska, Julia, Kharlina, Rika dan Yunita, Cristina. (2014). *Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Koperasi Lister PT.PLN (Persero) Kota Palembang*, Jurnal Akuntansi.
- Ghozali, Imam. (2005). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*. Universitas Diponegoro, Semarang.

- Hall, James A. (2001). *Sistem Informasi Akuntansi*, Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. (2007). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.
- Harahap, Sofyan, Syafri. (2002). *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2007). *Standard Akuntansi Keuangan*, Jakarta, Salemba Empat.
- Irham, Fahmi. (2012). *Analisis Laporan Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Jogiyanto, H.M. (2005). *Analisa dan Desain Sistem Informasi: Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktik Aplikasi Bisnis*. Yogyakarta: Andi.
- Juwita. (2013). *Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*. Jurnal: Akuntansi.
- Kasmir. (2011). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
- Mahmudi. (2007). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik Edisi Pertama*. Yogyakarta: Andi.
- Modus Aceh. *Paripurna DPRK Aceh Utara; Satu Sidang Segudang Temuan*. 28 Mei 2015.
- Mulyana, Budi. (2006). *Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*, Jurnal Akuntansi Pemerintahan, volume 2, Nomor 1, Universitas Gajah Mada.
- Munawir, Slamet. (2002). *Analisa Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Liberty.
- Nordiawan, Deddi. (2007). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 65 Tahun 2010. *Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah*.
- Rama, Dasaratha V. dan Jones, Frederick L. 2006. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta : Salemba Empat.
- Rohman, Abdul, (2009). *Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Fungsi Pengawasan*

- dan Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis* Vol. 9 No. 1. Universitas Diponegoro Semarang.
- Romney, Marshall B, and Steinbert, Paul John. (2004). *Accounting Information Systems*, International Edition, Ninth Edition, Prentice Hall, New Jersey.
- Santoso, Singgih. (2002). *Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Sudjana. (2002). *Metode Statistika*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2007). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sundjaja, S., Ridwan, dan Barlian, Inge. (2002). *Manajemen Keuangan Satu*, Edisi Keempat, Jakarta, Prenhallindo.
- Susanto, Azhar. (2008). *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Lingga Jaya.
- Susilastri. (2010). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Sistem Informasi Akuntansi pada Bank Umum Pemerintah di Kota Pekanbaru, *jurnal: Akuntansi Universitas Sumatera Utara*.
- Suwardjono. (2006). *Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan*. Yogyakarta : BPFE
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Otonomi Daerah.
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- Yamit, Zulian. (2005). *Manajemen Keuangan : Ringkasan Teori dan Penyelesaian Soal*. Edisi Pertama Cetakan Kedua. Yogyakarta: Ekonosia.
- Zuwida. (2011). *Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: EKONISIA